

**DAMPAK BREXIT TERHADAP PEMOTONGAN BANTUAN LUAR  
NEGERI INGGRIS DI NIGERIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

OLEH:

**IRFANI FEBRIYANTI FAHMIL**

**E061201101**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2024

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK BREXIT TERHADAP PEMOTONGAN BANTUAN  
LUAR NEGERI INGGRIS DI NIGERIA

N A M A : IRFANI FEBRIYANTI FAHMIL

N I M : E061201101

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 7 Mei 2024



Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ishaq Rahman, S.IP, M.Si  
NIP. 19721028200511002

  
Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.  
NIDN. 0906108902

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK BREXIT TERHADAP PEMOTONGAN BANTUAN  
LUAR NEGERI INGGRIS DI NIGERIA

N A M A : IRFANI FEBRIYANTI FAHMIL

N I M : E061201101

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 30 April 2024.

TIMEVALUASI

Ketua : Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfani Febriyanti Fahmil  
NIM : E061201101  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“Dampak Brexit Terhadap Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Nigeria”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Mei 2024

Menyatakan,



Irfani Febriyanti Fahmil

## KATA PENGANTAR

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga penyusunan skripsi dengan judul “**Dampak Brexit Terhadap Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Nigeria**” dengan baik tidak terlepas dari rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkah-Nya. Ucapan sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh tauladan dan pemimpin yang membimbing sebaik-baiknya kebaikan. Adapun penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, dan penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta isu hubungan internasional.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga pembaca dalam menambah pengetahuan serta wawasan. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik dari substansi penulisan maupun tata bahasa.

Selain itu, tidak lupa juga rasa terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Atas berkat arahan, bimbingan dan saran yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena demikian izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu penulis dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini:

1. Kedua orangtua penulis, **Fahmil Dewantoro** dan **Irma Suhelmi** yang telah memberikan kebebasan bagi penulis untuk belajar segala hal baru, memberikan kesempatan bagi penulis untuk menentukan masa depan sesuai dengan keinginan penulis, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa yang berharga bagi penulis. Tidak lupa juga dua adik saya **Putri Anjellika Fahmil** dan **Rere Aulia Fahmil** yang walaupun terpaut perbedaan umur tiga tahun dapat berperan seolah menjadi teman sebaya penulis. Atas waktu nonton bareng setiap liburan semester penulis, cerita banyak hal, ngemil bareng, dan sebagainya. Sebab mereka penulis tidak pernah merasa kekurangan teman.
2. Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta jajaran.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik beserta jajaran, dan seluruh staf fakultas.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.**
5. **Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I dan **Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA** selaku Dosen Pembimbing II. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan dan terutama dalam penyusunan skripsi ini.

- 6. Seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional** yang telah memberikan begitu banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan penulis sebagai mahasiswa HI FISIP Unhas. Berkat dedikasi Bapak/Ibu dosen sekaligus penulis dapat merasakan dunia perkuliahan yang ramah, asik, dan keren serta merupakan salah satu bayangan penulis sewaktu SMA dahulu. Tidak hanya ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan namun suasana belajar yang selalu seru menambah pengalaman berharga penulis.
7. Kepada angkatan 2020 HI **Altera 20** yang berisikan manusia-manusia kece badai dan ambis yang mendorong penulis untuk turut serta aktif dalam dunia perkuliahan.
- 8. Teman-teman KKNT BPJS Ketenagakerjaan Kab. Pangkep G-110**, terutama teman-teman posko Labakkang **Hamzah, Diza, Rani, Fira, Pahira, dan Dian**. Terima kasih sudah memberi warna pada masa KKN dimana awalnya penulis kira akan senyap, sunyi, dan *awkward*. Nyatanya jauh dari itu, penulis mendapatkan teman cerita, curhat, bahkan tertawa berkat kalian.
9. Sahabat terbaik di dunia penulis **Sya'diah Wulan Cahya dan Juan Alfian Matatta**. Kepada Wulan terima kasih banyak karena telah menjadi sobat stress penulis selama ini. Dari waktu kuliah hingga waktu penyusunan skripsi senantiasa diisi dengan ke-stress-an. Tapi dengan demikian suasana penyusunan skripsi

penulis menjadi lebih beragam. Kepada sobat dari SMP penulis yakni Juan, terima kasih karena sudah menjadi *support system* penulis dari kuliah, sempro, hingga penyusunan skripsi. Atas berkat saran-saran yang diberikan walaupun tidak pernah penulis ikuti telah membantu penulis menetralsir stress. Tidak lupa pula rasa terima kasih atas jasa antar jemputnya selama ini.

10. Terakhir kepada diri sendiri **Irfani Febriyanti Fahmil**. Mungkin ini hanya menjadi salah satu langkah dalam hidup, tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur dan menikmati prosesnya. Allah telah siap dengan segala rencana baiknya. Tetap menjadi manusia yang visioner dan berprinsip. Tapi ingat bahwa kamu juga perlu istirahat dan menikmati hidupmu. Untuk di masa yang akan datang semoga kamu dapat menjadi seseorang yang dibanggakan tidak hanya oleh keluargamu tapi juga oleh kamu. Senantiasa ingat kepada Allah dan berdamailah dengan dirimu sesekali.

Makassar, 13 Maret 2024

Penulis



Irfani Febriyanti Fahmil



## ABSTRAK

**IRFANI FEBRIYANTI FAHMIL, E061201101.** “Dampak Brexit terhadap Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Nigeria”. Di bawah bimbingan Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Brexit telah menjadi tonggak penting dalam sejarah Inggris yang tidak hanya mempengaruhi dinamika domestik, tetapi juga mengubah arah kebijakan luar negerinya. Salah satu perubahan yang terlihat adalah kebijakan pemotongan anggaran bantuan luar negeri *Official Development Assistance* (ODA) yang diberikan oleh Inggris kepada negara-negara penerima, termasuk Nigeria. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Brexit terhadap kebijakan pemotongan bantuan luar negeri Inggris di Nigeria, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brexit telah mendorong perubahan dalam kebijakan luar negeri Inggris, dengan fokus pada upaya perbaikan pasca-Brexit dan peningkatan kehadiran global yang tercermin dalam konsep *Global Britain*. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pasca-Brexit yang sejalan dengan *decision making process*. Secara eksternal, kondisi global, terutama di kawasan Indo-Pasifik, telah mendorong Inggris untuk menekankan wilayah tersebut sebagai kawasan strategis untuk mencapai tujuan *Global Britain*. Sementara secara internal, kepentingan nasional Inggris yang mengutamakan perbaikan ekonomi dan kebijakan pragmatis menjadi faktor utama dalam pembentukan kebijakan.

Keputusan untuk memotong anggaran bantuan ODA bertujuan untuk menghemat anggaran pemerintah Inggris demi mencapai kebijakan lain yang lebih strategis. Dampak pemotongan ini terasa di Nigeria, di mana sejumlah program kesehatan dan pendidikan mengalami penghentian karena kurangnya dana bantuan. Namun demikian, tantangan internal Nigeria seperti masalah politik, ekonomi, dan keamanan, menyulitkan penggunaan bantuan secara efektif. Meskipun demikian, pemotongan bantuan dapat mendorong Nigeria untuk mencari solusi mandiri dan melakukan reformasi kebijakan yang lebih baik guna memanfaatkan bantuan luar negeri secara optimal.

**Kata Kunci:** Brexit, *Decision making*, bantuan luar negeri, Inggris, Nigeria, sektor kesehatan, sektor pendidikan

## ABSTRACT

**IRFANI FEBRIYANTI FAHMIL, E061201101.** "The Impact of Brexit on the Reduction of British Foreign Aid to Nigeria." Under the supervision of Mr. Ishaq Rahman, S.IP., M.Si as Supervisor I and Mrs. Atika Puspita Marzaman, S.IP., MA as Supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

Brexit has become a significant milestone in the history of the United Kingdom, not only affecting domestic dynamics but also altering its foreign policy direction. One visible change is the policy of reducing foreign aid Official Development Assistance (ODA) provided by the UK to recipient countries, including Nigeria. This research aims to examine the impact of Brexit on the British foreign aid reduction policy in Nigeria, particularly in the healthcare and education sectors. A descriptive qualitative approach is employed, collecting data from various credible literature sources such as books, journals, and scholarly articles.

The research findings indicate that Brexit has driven changes in UK foreign policy, focusing on post-Brexit improvement efforts and increased global presence reflected in the concept of Global Britain. These changes are influenced by internal and external factors post-Brexit, aligning with the decision-making process. Externally, global conditions, especially in the Indo-Pacific region, have prompted the UK to emphasize it as a strategic area to achieve the goals of Global Britain. Meanwhile, internally, British national interests prioritizing economic improvement and pragmatic policies are key factors in policy formation.

The decision to cut ODA aims to save the UK government budget to achieve other strategic policies. The impact of these cuts is felt in Nigeria, where several healthcare and education programs have been discontinued due to a lack of aid funding. Nevertheless, internal challenges in Nigeria such as political, economic, and security issues hinder the effective use of aid. Despite this, aid reductions can prompt Nigeria to seek independent solutions and enact better policy reforms to optimize foreign aid utilization.

**Keywords:** Brexit, Decision making, foreign aid, UK, Nigeria, healthcare sector, education sector.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah</b> .....	<b>13</b>
<b>C. Tujuan</b> .....	<b>14</b>
<b>D. Manfaat</b> .....	<b>14</b>
<b>E. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>15</b>
1. Decision Making.....	15
2. Bantuan luar negeri.....	17
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>23</b>
1. Tipe Penelitian.....	23
2. Jenis dan Sumber Data.....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisis Data.....	24
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
<b>A. Teori Realisme Neoklasik</b> .....	<b>27</b>
<b>B. Konsep Decision Making</b> .....	<b>36</b>
<b>C. Konsep Bantuan Luar Negeri</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BREXIT DAN BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS</b> .....	<b>57</b>
<b>A. Referendum dan Brexit</b> .....	<b>57</b>
1. Hubungan Inggris dan Uni Eropa.....	57
2. Alasan Referendum 2016.....	62
3. Proses Brexit.....	67
4. Dampak Brexit.....	72
<b>B. Kebijakan Bantuan Luar Negeri Inggris</b> .....	<b>83</b>
1. Mekanisme Bantuan Luar Negeri Inggris.....	83

2. Tren Distribusi Bantuan Luar Negeri Inggris.....	88
3. Distribusi Bantuan Luar Negeri Inggris di Nigeria.....	94
<b>BAB IV ANALISA DAMPAK BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS.....</b>	<b>99</b>
<b>A. Brexit dan Kebijakan Pemotongan Anggaran Bantuan Luar Negeri     Inggris.....</b>	<b>101</b>
<b>B. Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris sebagai Kebijakan Luar Negeri     Inggris di Nigeria.....</b>	<b>114</b>
<b>C. Dampak Kebijakan Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Nigeria     dalam Sektor Kesehatan dan Pendidikan.....</b>	<b>121</b>
1. Kondisi Domestik Nigeria.....	121
2. Dampak Pemotongan Bantuan Luar Negeri di Sektor Kesehatan.....	136
3. Dampak Pemotongan Bantuan Luar Negeri di Sektor Pendidikan....	143
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>162</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>162</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>166</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>168</b>
<b>A. Buku.....</b>	<b>168</b>
<b>B. Artikel Jurnal &amp; Report.....</b>	<b>169</b>
<b>C. Sumber Internet.....</b>	<b>174</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual.....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 2.1 Model Realisme Neoklasik pada Kebijakan Luar Negeri.....</b>	<b>30</b>
<b>Gambar 2.2 Model Decision Making SBS.....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 3.1 Perdagangan Inggris tidak mengalami pemulihan secepat negara lain.....</b>	<b>74</b>
<b>Gambar 3.2 Total ODA yang digunakan tiap departemen yang bukan FCDO.....</b>	<b>87</b>
<b>Gambar 3.3 Distribusi bilateral ODA Inggris di 10 negara terbesar penerima bantuan.....</b>	<b>89</b>
<b>Gambar 3.4 Distribusi bilateral ODA Inggris di beberapa wilayah penerima bantuan.....</b>	<b>91</b>
<b>Gambar 3.5 Distribusi bilateral ODA Inggris di Nigeria.....</b>	<b>96</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 23 Juni tahun 2016 lalu, Inggris atau Britania telah melaksanakan Referendum Brexit atau British Exit. Referendum ini bertujuan untuk meminta pendapat masyarakat mengenai masa depan keanggotaan Britania yang meliputi Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sebagai bagian dari Uni Eropa (Reenen, 2016). Lebih jelasnya bahwa referendum ini merupakan kebijakan pemerintah untuk meminta pendapat masyarakat apakah Inggris harus menetap atau keluar dari keanggotaannya di UE. Hasilnya yaitu sebesar 51,9 persen masyarakat setuju apabila Inggris meninggalkan UE atau pro Brexit dan sebesar 48, 1 persen lainnya menolak atau dapat dikatakan kontra Brexit (Reenen, 2016). Kemudian Inggris secara resmi keluar dari UE pada tanggal 31 Januari 2020 dan memasuki masa transisi ekonomi. Masa transisi ini berlaku hingga akhir tahun 2020 dimana Inggris masih dapat menjadi anggota pasar tunggal UE. Selain itu, masa transisi ini juga menjadi kesempatan bagi Inggris untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan UE.

Selama masih menjadi bagian dari UE, Inggris dapat merasakan sejumlah keuntungan terutama dalam bidang perekonomian. Salah satunya yang paling prestisius adalah pasar tunggal UE. Pasar tunggal ini memberikan jaminan atas pergerakan bebas barang, modal, jasa dan juga lapangan pekerjaan atau sering disebut dengan empat kebebasan dalam UE (CNBC

Indonesia, 2020). Pergerakan bebas ini didukung dengan penghapusan tarif, kuota atau hambatan perdagangan dengan tujuan meningkatkan volume ekspor impor dan mobilitas tenaga kerja. kemudian, selama menjadi anggota UE investasi langsung asing yang diperoleh Inggris dari negara UE lainnya bukan tanpa sebab, mengingat UE telah memiliki kontribusi besar dalam menyediakan investor untuk Inggris. Beberapa keuntungan lainnya yang diperoleh Inggris untuk bidang investasi melalui UE yaitu memudahkan akses bagi para investor dari negara anggota UE lainnya. Sekali lagi Pasar Tunggal UE menyediakan lingkungan perekonomian yang bebas terutama untuk Inggris yang memiliki lingkungan ekonomi yang menarik karena memiliki kebijakan tertentu jika dilihat dari segi lingkungan dan yang terakhir yaitu akses yang mudah bagi perusahaan multinasional yang memiliki jaringan yang kompleks dan memiliki banyak rantai pasokan serta anak perusahaan karena biaya koordinasi yang kurang di UE. Dengan terjadinya Brexit telah menyebabkan Inggris kehilangan investor dari UE sekaligus menciptakan keragu-raguan investor di luar UE.

Sampai sekarang pun keputusan Brexit Inggris masih menjadi perbincangan yang begitu hangat di kalangan para ahli dan masyarakat yang terbagi menjadi dua kubu yaitu pro Brexit dan kontra Brexit. Satu kubu berargumen bahwa Brexit membawa keuntungan bagi Inggris namun kubu lainnya menganggap justru Brexit membawa dampak negatif berkepanjangan bagi Inggris. Terutama dalam aspek perekonomian Inggris. Brexit akan lebih berdampak pada perekonomian Inggris melalui beberapa indikator yang

dijadikan sebagai tolak ukur perekonomian suatu negara seperti Produk Domestik Bruto atau PDB, investasi dan juga perdagangan. Hal-hal inilah yang memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas perekonomian Inggris.

Lebih jelasnya bahwa perekonomian Inggris mengalami penurunan pasca Brexit dapat dilihat dari pertumbuhan PDB Inggris yang menurun. Pada kuartal keempat tahun 2016 pertumbuhan PDB Inggris mencapai 0,7 persen. Namun mengalami penurunan hingga hanya mencapai sebesar 0,3 persen pada kuartal pertama tahun 2017 (Kirby dkk., 2017). Beberapa hal yang menyebabkan ini yaitu, **pertama** ialah pelemahan mata uang poundsterling. Pelemahan mata nilai mata uang ini telah dirasakan semenjak referendum Brexit tahun 2016 dimana poundsterling turun sampai 1,33 dollar dari yang awalnya 1,50 dollar sebelum Brexit. Pelemahan poundsterling ini merupakan yang terendah semenjak tahun 1985 atau selama 31 tahun lamanya di pasar mata uang dan kerugian terbesar dalam sejarah Inggris (Allen dkk., 2016). Pelemahan ini mengakibatkan biaya ekspor Inggris lebih murah sedangkan biaya impor makin mahal yang dapat mendorong terjadinya inflasi. **Kedua**, Brexit diperkirakan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi lapangan kerja karena terbatasnya akses mobilitas imigran ke Inggris. Dan **ketiga** yaitu Brexit dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan rumah tangga rata-rata di Inggris (Feliu, 2017).

Kemudian sektor lain juga terkena dampak Brexit adalah investasi langsung ke Inggris. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sebesar dua per



lima atau sekitar 42,6 persen mitra investasi Inggris merupakan negara anggota UE lainnya. Artinya meninggalkan UE sama dengan kehilangan hampir setengah investor yang dimiliki Inggris. Secara keseluruhan pada tahun 2019 kerugian ekonomi yang telah dialami oleh Inggris mencapai hingga 600 juta poundsterling untuk setiap minggunya (Reid, 2019). Salah satunya ialah penurunan investasi langsung asing dimana pada tahun 2017 jumlah investasi di Inggris sebesar 80,6 miliar dan turun jauh menjadi 49,3 miliar tahun 2018 dan akan terus berkurang setidaknya hingga mencapai angka 37,5 persen menurut para ahli (University College London, 2020). Contoh perusahaan yang menghentikan investasinya di Inggris adalah perusahaan Toyota. Perusahaan ini menarik investasi mobil listriknya sampai dengan tahun 2027 atau ketika perekonomian Inggris pasca Brexit telah stabil (Jolly, 2020).

Berdasarkan kondisi perdagangan, pelemahan mata uang, serta penurunan angka investasi dan terutama ketidakpastian perekonomian telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Inggris memburuk. Performa ekonomi Inggris yang memburuk ini tidak hanya terjadi di sekitar tahun pasca referendum, namun berdampak untuk beberapa tahun kedepannya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Inggris yang buruk diperparah dengan krisis global seperti Pandemi Covid-19 dan invasi Rusia di Ukraina. Kejadian ini menyebabkan rantai pasokan global menjadi terganggu dan mengakibatkan terjadi kenaikan harga, ketidakpastian ekonomi serta gangguan dalam perdagangan. Akhirnya Inggris mengambil keputusan untuk melakukan

penghematan anggaran perekonomian salah satunya adalah anggaran bantuan luar negeri (The Independent Commission for Aid Impact, 2023).

Selain itu untuk mengatasi dampak perekonomian yang memburuk maka pemerintah Inggris berusaha untuk membuat kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan kepentingan nasional Inggris terlebih dahulu. Salah satunya dengan melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negeri untuk negara-negara yang sudah bertahun-tahun menjadi negara penerima donor bantuan luar negeri Inggris. Pemotongan anggaran tersebut dilakukan Inggris dalam rangka menghemat pengeluaran anggaran negara dan hanya difokuskan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan Inggris. Tidak sedikit dari para ahli yang menyatakan bahwa kebijakan Inggris ini merupakan kebijakan pragmatis yang hanya memiliki dampak dalam jangka waktu yang pendek (Kedutaan Besar RI London, 2020). Kemudian perubahan kebijakan ini terlihat begitu jelas ketika Inggris mengeluarkan laporan kebijakannya pada tahun 2021. Laporan tersebut menekankan arah kebijakan Inggris pasca keluar dari UE yang menunjukkan bahwa Inggris akan menjadi negara yang lebih mandiri dan memperluas hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Arah kebijakan Inggris dituangkan ke dalam kebijakan *Global Britain* dimana secara harfiah pengertian *Global Britain* itu sendiri tidak dijabarkan begitu lengkap oleh pemerintah Inggris. Namun, *Global Britain* hanya diartikan lebih baik melalui tindakan langsung dibandingkan perkataan. Sedangkan untuk kebijakan nasional dan internasional sejatinya berasal dari kebijakan pemerintah yang telah dilakukan sejak pemilihan umum

tahun 2019 lalu. Kebijakan tersebut tertuang dalam tindakan pemerintah dalam mengutamakan kepentingan rakyat Inggris, mempertahankan keterbukaan perekonomian dan sosial masyarakat serta pergeseran kepentingan posisi dalam keamanan dan pertahanan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, Inggris meningkatkan pendekatannya dalam bidang ekonomi serta bidang keamanan dan pertahanan (GOV.UK, 2021). Perubahan kebijakan ini sebagai bentuk nyata Inggris yang mengutamakan kepentingan strategisnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk dalam penyaluran bantuan luar negeri, ekonomi dan juga pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut bantuan luar negeri Inggris disalurkan melalui berbagai macam bentuk dan salah satunya ialah melalui *Official Development Assistance* atau disingkat ODA. Bantuan ODA ini terdiri atas dua jenis yaitu dalam bentuk bantuan bilateral dan multilateral serta memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara penerima bantuan. Berdasarkan sejarahnya, komitmen bantuan Inggris ini berasal dari resolusi yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai target bantuan ODA pada tahun 1970. Resolusi tersebut mengatur target yang harus disumbangkan oleh negara donor ke negara penerima sebesar 0,7 persen dari pendapatan nasional. Kemudian pemerintah Inggris mencapai target tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2013 dan di tahun 2015 keharusan untuk mencapai target tersebut dituangkan dalam undang-undang Inggris (The Week, 2021). Kemudian untuk penetapan negara-negara penerima ODA, pedoman maupun standar dari ODA itu sendiri ditetapkan oleh DAC

atau *Development Assistance Committee*. DAC adalah komite yang bertugas untuk memantau sekaligus mengevaluasi bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara anggota OECD atau *Organisation for Economic Cooperation and Development*.

Bantuan ODA disalurkan melalui berbagai lembaga baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satunya adalah departemen pemerintah Inggris yaitu *Department for International Development* atau DFID yang kemudian lembaga ini dilebur menjadi satu dengan *Foreign and Commonwealth Office* atau FCO menjadi *Foreign, Commonwealth and Development and Development Office* (FCDO) pada Juni tahun 2020. Sebenarnya peleburan departemen ini sudah menjadi satu indikasi perubahan kebijakan Inggris pada bantuan luar negerinya terutama ODA Inggris. Perubahan tersebut menyatakan bahwa pengeluaran atau penggunaan ODA harus berjalan secara selaras dengan kepentingan keamanan dan perdagangan Inggris. Sehingga pada perkembangannya Inggris melakukan pengalokasian anggaran negaranya dengan ketat salah satunya yaitu dengan melakukan pemotongan anggaran dalam bantuan ODA menjadi 0,5 persen.

Tepatnya pada tanggal 25 November tahun 2020 Menteri Keuangan Inggris, Rishi Sunak mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan mengurangi anggaran bantuan luar negeri dalam hal ini ODA Inggris menjadi 0,5 persen. Setelah pengumuman tersebut, Rishi Sunak memberikan usulan terkait pemotongan anggaran ke *House of Commons* pada tanggal 12 Juli 2021.

Selanjutnya di tanggal 13 Juli *House of Commons* menyetujui usulan tersebut sekaligus menyetujui syarat anggaran bantuan luar negeri akan dikembalikan ke 0,7 persen apabila perekonomian Inggris kembali stabil. Pemotongan anggaran ini setidaknya memangkas anggaran bantuan luar negeri sebesar 4,6 miliar poundsterling (Worley, 2022).

Selanjutnya timbul pertanyaan menarik mengingat keputusan pemotongan bantuan Inggris ini di pemberitaan seringkali hanya dikaitkan dengan dampak Pandemi Covid. Faktanya pemotongan anggaran bantuan luar negeri Inggris ini sudah diperkirakan oleh para ekonom beberapa tahun sebelum terjadinya Pandemi. Seperti yang dipaparkan oleh sebuah publikasi dari Norton Rose Fulbright mengenai dampak Brexit terhadap bantuan luar negeri Inggris. Dimana publikasi tersebut memaparkan bahwa jika saja anggaran bantuan Inggris tidak dipotong karena masalah politik maka kemungkinan terbesarnya ialah diakibatkan karena Brexit jika perekonomian Inggris mengalami resesi atau penurunan pendapatan nasional (Norton Rose Fulbright, 2017). Kemudian segala bukti menjadi jelas bahwa Inggris telah merencanakan perubahan kebijakan yang lebih fokus untuk memberikan manfaat bagi Inggris, yang mana kebijakan tersebut dituangkan pada rencana kebijakannya dalam membangun hubungan internasional yang harus didasarkan pada keselarasan dengan diplomatik, politik serta prioritas komersial pemerintah Inggris.

Lebih lanjut berdasarkan pemaparan peneliti dari *University of Chicago*, Nicolas Wessler bahwa Brexit tidak hanya memberikan dampak antara Inggris dan UE saja, melainkan negara dunia ketiga juga akan terdampaknya. Kemudian dari Paula Bauwens yang merupakan seorang Konsultan Internasional menyatakan bahwa bantuan luar negeri Inggris akan difokuskan kepada negara-negara yang benar membutuhkan dan yang relevan serta sesuai dengan kepentingan nasional Inggris karena Inggris akan memfokuskan anggaran negara untuk pembangunan domestik Inggris pasca Brexit (Russu, 2019). Tidak hanya, terdapat sejumlah lembaga-lembaga non pemerintahan yang mengkritik bahwa perubahan kebijakan Inggris tersebut hanya fokus pada keamanan dan kepentingan diplomatik Inggris dibandingkan kepentingan bagi masyarakat sipil.

Akibatnya negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya mesti terhambat bahkan banyak dari program tersebut yang akhirnya tidak dapat berjalan. Per tahun 2021 sejumlah negara dan program yang mengalami pemotongan anggaran bantuan ini meliputi Yaman dimana bantuan kemanusiaan dikurangi dari 197 juta poundsterling menjadi 87 poundsterling, kemudian di Suriah pemotongan bantuan kemanusiaan Inggris turun menjadi 906 juta poundsterling dari 1,6 miliar poundsterling. Kemudian bantuan bilateral di Afrika turun sebesar 66 persen atau dari 2,2 miliar poundsterling menjadi 760 juta poundsterling (Wintour, 2021). Pemotongan bantuan ini tentu

sangat akan berdampak pada kondisi dalam negeri negara penerima salah satunya seperti di Nigeria.

Nigeria merupakan salah satu negara yang berada di Afrika Barat dan merupakan negara yang pernah menjadi koloni Inggris sebelum merdeka pada tanggal 16 Juli 1966. Pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 206 juta menjadikan Nigeria sebagai negara dengan penduduk yang terpadat di Afrika dan sekaligus yang ketujuh di dunia. Selain Nigeria merupakan negara dengan tingkat perekonomian yang terbesar di Afrika, produsen minyak terbesar, lahan yang subur dan juga pasar internal yang sangat besar menjadikan Nigeria dengan negara yang prospek ekonomi yang lebih dari kata menyajikan. Maka tidak heran jika Nigeria dapat dikatakan sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang maju di Afrika. Selain itu berdasarkan prospek yang ditawarkan oleh Nigeria dapat dikatakan bahwa Nigeria merupakan salah satu mitra yang strategis bagi Inggris baik sebagai pasar perekonomian maupun dalam peningkatan kerjasama di berbagai bidang.

Namun, kondisi yang tidak baik melanda Nigeria ketika Brexit terjadi. Selain memiliki dampak bagi Inggris sendiri, Brexit juga memiliki dampak di negara-negara berkembang lainnya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. *The International Monetary Fund* pada Juli 2016 lalu mengumumkan bahwa Brexit dapat berdampak pada perekonomian Nigeria yang dapat mengakibatkan pada resesi ekonomi yang dari awalnya 2,3 persen menjadi 1,8 persen (Tan, 2016). Perekonomian Nigeria yang awalnya telah

mengalami penurunan ekonomi akibat rendahnya permintaan global yang ditambah dengan situasi Brexit tentu menjadi salah satu pukulan telak bagi perekonomian Nigeria. Pada awalnya perdagangan antara Nigeria dan Inggris sebelum Brexit dapat mencapai sekitar 6 miliar poundsterling telah diperkirakan dapat mencapai 20 miliar poundsterling di tahun 2020 nanti, kenyataannya hal tersebut hanyalah perkiraan terlalu optimis.

Hubungan kerjasama antara Inggris dan Nigeria telah terjalin semenjak kemerdekaan Nigeria dari Inggris, dimana Inggris memberikan bantuan ekonomi dan sosial untuk Nigeria. Bantuan ini pada awalnya berupa bantuan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sektor pertanian dan juga kesehatan. Barulah dalam beberapa tahun terakhir bantuan tersebut digunakan ke bidang yang lebih spesifik seperti pendidikan, kesehatan dan pemerintahan. Bantuan tersebut secara lebih lengkapnya dialokasikan untuk mendukung secara langsung masyarakat Nigeria itu sendiri, bantuan yang diberikan digunakan untuk membentuk sumber daya manusia yang optimal. Selain itu, juga membantu para anak-anak mendapatkan pendidikan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan, sanitasi serta air bersih.

Beberapa contoh alokasi bantuan ODA Inggris di Nigeria diantaranya seperti program Propcom Mai-karfi sebuah program yang didanai oleh DFID sejak tahun 2012 hingga 2022. Program ini berfokus pada bidang agrikultur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan bagi para petani kecil dan membuka akses pasar yang lebih luas serta untuk promosi



adaptasi teknologi yang lebih canggih. Selanjutnya program *Support to the National Malaria Programme in Nigeria 2* (SuNMaP 2) yang merupakan program yang berfokus pada bidang kesehatan untuk meningkatkan akses dalam pencegahan dan juga pengobatan Malaria di Nigeria.

Masalah lainnya timbul ketika pemotongan bantuan ODA Inggris dilaksanakan. Pemotongan anggaran ODA Inggris menjadi 0,5 persen turun dari target yang telah ditetapkan PBB. Berdasarkan laporan dari FCDO telah terjadi penurunan bantuan luar negeri di Nigeria sejak tahun 2017 kemudian penurunan hingga 100 juta poundsterling pada tahun 2020 lalu. Pemotongan bantuan luar negeri kembali dilakukan pada tahun 2021 sehingga total bantuan yang diterima hanya sebesar 140 juta poundsterling (Foreign, Commonwealth & Development Office, 2023).

Pemotongan bantuan luar negeri oleh Inggris ini tentu saja berdampak pada kondisi di Nigeria, dimana sejumlah program yang bersumber dari pendanaan ini berhenti sebelum saatnya hingga dibatalkan. Tentu saja yang nantinya merasakan dampak ini adalah masyarakat langsung Nigeria itu sendiri. Beberapa program yang terkena dampaknya di antara lain seperti yang dialami oleh Bukola Onyishi yang menerima bantuan dana dari bantuan luar negeri Inggris untuk menjalankan sebuah program pengembangan perempuan yang membantu para perempuan yang kabur dari konflik untuk mengembangkan kemampuan bisnis mereka, hasilnya sebesar 62 persen perempuan berhasil lolos dari kursus tersebut dan memiliki penghasilan

sendiri. Namun, akhirnya dana program ini harus berhenti sebelum waktunya karena dampak pemotongan bantuan luar negeri Inggris. Kemudian bantuan di bidang kesehatan juga terkena dampaknya, salah satunya yaitu program SuNMaP 2 yang bertujuan mengurangi penyebaran malaria di Nigeria yang berfokus pada pencegahan dan penanganan malaria. Sama dengan kasus sebelumnya program ini juga harus diberhentikan sebelum waktunya yang harusnya selesai pada tahun 2024 tapi berhenti di tahun 2021.

Pada dasarnya untuk mencari informasi dampak Brexit terhadap aspek-aspek lain mengenai Inggris dan negara-negara yang terjalin hubungan dengannya merupakan hal yang sulit mengingat pemerintah Inggris sendiri pun kurang transparan terkait data-data terkait Brexit terutama data terkait pemotongan bantuan luar negeri Inggris seperti sektor apa saja yang terkena dampaknya dan seberapa besar pengurangan di masing-masing sektor. Namun, hal ini tetap menjadi masalah mengingat Brexit kurang diangkat sebagai salah satu penyebab signifikan diputuskannya kebijakan untuk melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negeri ODA Inggris. Topik ini tertutup dengan apik diantara topik krisis global lainnya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari pembahasan yang akan diteliti oleh penulis maka penulis memberikan batasan pada dampak Brexit terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Inggris. Kemudian faktor-faktor yang membuat Inggris melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negeri menjadi 0,5 persen.

Selanjutnya penulis menetapkan bahwa bantuan luar negeri yang dibahas adalah bantuan ODA. Serta bagaimana dampak pemotongan anggaran bantuan luar negeri Inggris terhadap Nigeria. Dampak pemotongan bantuan luar negeri Inggris tersebut akan dilihat melalui sejumlah program yang sedang berjalan di beberapa sektor seperti kesehatan dan juga pendidikan. Maka adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu:

1. Bagaimana Brexit berperan terhadap kebijakan pemotongan bantuan luar negeri Inggris?
2. Bagaimana dampak pemotongan bantuan luar negeri terhadap program bantuan yang didanai Inggris di Nigeria?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Dampak Brexit terhadap Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Negara Afrika dengan mengambil studi kasus di Nigeria. Adapun secara jelasnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Brexit terhadap kebijakan pemotongan bantuan luar negeri Inggris.
2. Untuk mengetahui dampak pemotongan bantuan luar negeri Inggris di Nigeria terhadap program bantuan yang didanai oleh Inggris.

### **D. Manfaat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang memiliki perhatian dan minat yang sama terkait Dampak Brexit terhadap

pemotongan Bantuan Luar Negeri di Negara Afrika terkhususnya di Nigeria, mengingat masih kurangnya peneliti yang membahas terkait dampak Brexit terhadap pemotongan bantuan luar negeri Inggris dan dampaknya di negara-negara penerima bantuan luar negeri tersebut terutama di negara-negara berkembang seperti di Nigeria.

2. Sebagai wujud implementasi ilmu dan minat penulis yang didapatkan selama menjalani perkuliahan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Decision Making**

*Decision Making* dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara mempertimbangkan segala keputusan dan alternatif yang paling memungkinkan dan untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan (Al Kafarneh, 2013). Dalam jurnal yang sama Al Kafarneh memaparkan bahwa proses *decision making* berlangsung dengan melalui beberapa tahapan seperti **pertama** kesadaran dari *decision maker* atas masalah yang ada. **Kedua** tahap mendefinisikan situasi lalu tahapan **ketiga** yaitu proses untuk identifikasi solusi-solusi alternatif dan pembuatan keputusan. **Keempat** tahap implementasi keputusan dan tahap **kelima** atau tahap yang terakhir yaitu tahapan masukan atau *feedback*. Dari tahapan-tahapan tersebutlah proses *decision making* berlangsung hingga menghasilkan satu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.

Konsep *decision making* atau pengambilan keputusan merupakan konsep dalam hubungan internasional yang mana dalam konsep ini melibatkan serangkaian proses yang rumit dalam tingkat negara dimana rangkaian proses tersebut nantinya akan menghasilkan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Richard Snyder, H. W Bruck dan Burton dalam buku *Foreign Policy Decision Making* memiliki model pendekatan terhadap proses pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan luar negeri dengan memberikan penekanan terhadap faktor-faktor yang mendorong suatu negara untuk bertindak dalam hubungan internasional. Faktor-faktor tersebut setidaknya dibagi ke dalam dua kategori yaitu *internal setting* dan *external setting*.

*Internal setting* merujuk pada kondisi dalam negeri suatu negara seperti politik domestik, opini publik dan juga posisi geografis dari negara tersebut sedangkan *external setting* adalah segala kondisi yang berasal dari luar batas negara seperti tindakan dari negara lain yang terjadi karena suatu sebab akibat tertentu (Kurniawan, 2017). Pendekatan model ini mencoba untuk menjelaskan bahwa di dalam hubungan internasional interaksi antar negara yang dilakukan melalui pembuatan kebijakan luar negeri mencerminkan proses yang kompleks yang terdiri dari beragam faktor yang saling berhubungan. Dimana faktor internal juga sama sama pentingnya dengan faktor eksternal bahkan dikatakan lebih dominan. Karena suatu faktor eksternal bisa saja tidak berimplikasi terhadap

kebijakan suatu negara namun jika hal tersebut nantinya ternyata bersinggungan dengan faktor-faktor internal negara maka hal tersebut akan memicu terjadinya perubahan kebijakan dari suatu negara. Relevan dengan teori realisme neoklasik yang percaya bahwa hubungan internasional yang terjadi antar negara melibatkan sejumlah faktor internal dan juga eksternal menjadi tepat untuk menjelaskan konteks arah kebijakan Inggris yang kemudian mendorong Inggris untuk melakukan pemotongan anggaran terhadap anggaran bantuan luar negerinya dalam hal ini ODA kepada negara-negara penerimanya.

## **2. Bantuan luar negeri**

Bantuan luar negeri dalam perkembangan bantuan luar negeri menghadapi berbagai dinamika dalam hal definisi. Pada sejarahnya bantuan luar negeri menjadi suatu kebijakan yang cukup dominan selama masa berakhirnya perang dunia dua. Seiring dengan bertambah kompleksnya hubungan internasional konsep bantuan luar negeri pun seringkali mengalami pergeseran maknanya. Dalam Bahasa Inggris untuk istilah bantuan luar negeri yang berupa *foreign assistance* dan *foreign aid* tidak memiliki perbedaan yang mencolok bahkan dapat dikatakan memiliki makna yang sama (Rosyidin, 2022). Pada historisnya bantuan luar negeri dapat dilihat dari masa akhir kolonialisme dan setelah perang dunia dua. Setelah perang terdapat satu kebutuhan untuk merekonstruksi atau membangun kembali baik negara yang menang maupun kalah dan juga untuk membantu negara-negara yang baru berdiri. Pemulihan di

Eropa tergolong cepat karena bantuan dari Marshall Plan dan sumber bantuan lainnya. Sejak saat itu bantuan luar negeri menjadi populer dan terus berkembang hingga saat ini.

Bantuan luar negeri secara umum dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri dimana negara donor mengirimkan barang, uang, dan sebagai bantuan teknis kepada negara penerima (Depinto dkk., 2022). Pengertian lain mengenai bantuan luar negeri oleh Victor E. Ita yang mengutip dari World Bank bantuan luar negeri adalah transfer sumber daya kas negara donor yang dalam hal ini adalah negara yang lebih kaya ke negara berkembang baik itu dalam bentuk pendanaan langsung maupun dalam bentuk komoditas dan barang yang disubsidi dari negara donor (Ita, 2022 ). Berdasarkan pengertian tersebut secara sederhananya bantuan luar negeri merupakan bantuan yang diberikan dari negara donor atau dalam hal ini seringkali merupakan negara dengan perekonomian lebih maju ke negara penerima bantuan atau negara berkembang. Bentuk bantuan luar negeri ini juga beragam namun secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan bentuk penyalurannya yaitu bantuan bilateral dan bantuan multilateral. Bantuan bilateral merupakan bantuan yang disalurkan langsung dari negara donor ke negara penerima sedangkan bantuan multilateral ialah bentuk bantuan dimana negara donor memberikan sumbangan dana ke organisasi-organisasi terkait dan nantinya organisasi inilah yang menyalurkan bantuan tersebut.

Sedangkan menurut Morgenthau bantuan luar negeri dibagi kedalam enam jenis yaitu **pertama** *humanitarian aid* berupa bantuan yang diberikan kepada negara-negara yang terdampak bencana alam dan bantuan dapat disalurkan dalam bentuk tenaga kesehatan dan juga suplai makanan dan sebagainya. **Kedua** *subsistence aid* yaitu bantuan luar negeri yang ditujukan untuk memberikan bantuan atau dukungan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk namun tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. **Ketiga** *military aid* adalah bentuk bantuan yang bertujuan untuk memberikan dukungan militer. **Keempat** *bribery* yaitu jenis bantuan yang memberikan bantuan dalam bentuk insentif keuangan atau materi untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan suatu pemerintah atau bahkan organisasi asing. **Kelima** *prestige aid* bertujuan untuk menciptakan atau membangun sesuatu yang dapat menunjukkan kemajuan industri atau modernitas suatu negara dibandingkan menyelesaikan akar permasalahan yang berakibat pada tujuan yang berjalan tidak selaras dengan pembangunan ekonomi. Dan **keenam** yaitu *aid for economic development* yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi serta kemajuan sosial di negara penerima untuk menciptakan transformasi ekonomi sosial yang lebih baik (Morgenthau, 1962).

Menurut Muhammad Rosyidin dalam buku “Politik Bantuan Luar Negeri” membagi tipologi bantuan luar negeri ke dalam tiga bentuk yaitu *official Development Assistance (ODA)*, *Official Assistance (OA)* dan



*Humanitarian Assistance* (Bantuan Kemanusiaan). ODA adalah bantuan yang digunakan untuk mendorong pembangunan di negara-negara berkembang dan fokus pada bidang-bidang pemberdayaan maupun pembangunan sumber daya seperti pemberantasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengurangan tingkat pengangguran, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*. OA sendiri adalah bantuan yang lebih khusus pada masalah politik-keamanan yang ditujukan pada negara yang berpendapatan menengah ke atas yang diberikan berdasarkan faktor kedekatan diplomatik. Secara sederhana OA adalah representasi hubungan persekutuan antara donor dan penerima. Sedangkan untuk bantuan kemanusiaan adalah jenis bantuan yang diberikan kepada negara yang terdampak kejadian darurat seperti perang, konflik, bencana alam dan sebagainya (Rosyidin, 2022).

Bantuan luar negeri ini juga dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang salah satunya dari kacamata realis yang menganggap bahwa bantuan luar negeri sebagai alat yang digunakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dimana bantuan luar negeri ini dapat dikatakan sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan juga keamanan. Konsep ini nantinya digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pergeseran kebijakan Inggris yang menggunakan bantuan luar negeri sebagai alat untuk mencapai kepentingan pragmatisnya. Dimana Inggris yang melakukan

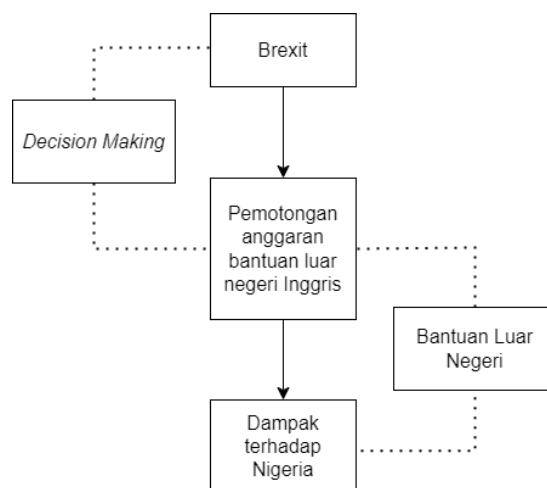
pemotongan anggaran bantuan luar negerinya kemudian anggaran bantuan luar negeri yang telah dipotong tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar dapat berjalan selaras dengan tujuan-tujuan dari Inggris tersebut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa bantuan luar negeri sebagai bentuk kebijakan luar negeri dari negara donor terhadap negara resipien. Karena itu untuk melihat dampak pemotongan bantuan luar negeri Inggris di Nigeria maka konsep ini juga akan digunakan untuk menjelaskan dampak dari bantuan luar negeri di negara resipien. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam perkembangan bantuan luar negeri ke negara lain menciptakan perdebatan di kalangan para peneliti yang di satu sisi mengatakan bahwa bantuan luar negeri dapat memberikan dampak positif terhadap negara resipien namun disisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti dalam sebuah artikel yang menjelaskan terkait dampak positif dan negatif bantuan luar negeri di negara-negara berkembang menyatakan bahwa bantuan luar negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jangka panjang melalui investasi di bidang struktur dan juga sumber daya manusia. Sedangkan bantuan luar negeri juga dapat memancing kerugian seperti menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menggantikan tabungan dan investasi domestik yang dapat berpotensi untuk meningkatkan kesenjangan dalam standar hidup masyarakat di negara-negara berkembang, dan dapat menciptakan ketidakefektifan jika bantuan luar negeri tidak dialokasikan dengan baik (Thapa, 2020). Karena itu dengan konsep bantuan luar negeri selain dapat

digunakan untuk menjelaskan motif dan kepentingan negara donor juga dapat digunakan untuk menjelaskan dampaknya terhadap negara resipien atau penerima.

Sehingga dengan menggunakan teori realisme neoklasik, *decision making*, dan bantuan luar negeri. Maka diharapkan penggunaan teori dan konsep tersebut dapat menjelaskan arah kebijakan Inggris yang melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negerinya dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak ke negara penerima bantuan tersebut dalam hal ini adalah Nigeria terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan adalah sebagai berikut



**Gambar 1.1 Skema Kerangka Konseptual**

Sumber diolah oleh penulis

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi. Dengan kata lain metode yang digunakan akan lebih memperhatikan aspek kualitatif dibandingkan aspek kuantitatif dengan tujuan untuk menggali lebih dalam terkait pemahaman tentang konteks dan makna dari fakta-fakta mengenai Dampak Brexit terhadap Pemotongan Bantuan Luar Negeri Inggris di Afrika terutama di Nigeria.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Penulis menggunakan jenis dan sumber data yang mengambil sumber penelitian melalui sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang digunakan dalam penelitian dimana informasi atau data yang diperoleh berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber ini merupakan analisis atau interpretasi informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dalam konteks penelitian yang sudah ada sebelumnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi jenis penelitian maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan metode *Library Research* dalam melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dan dibutuhkan dengan cara

menganalisis sejumlah literatur baik itu melalui media elektronik maupun nonelektronik seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, majalah hingga surat kabar yang sudah dipastikan keakuratan serta relevansi informasi yang telah diperoleh dari sumber tersebut.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada yang kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut sehingga dapat menghasilkan argumen yang relevan. Kemudian data kuantitatif yang didapatkan akan digunakan untuk memperkuat analisis kualitatif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan yaitu menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yang digunakan ditekankan pada penggambaran secara umum masalah yang dibahas, kemudian setelah itu menarik kesimpulan secara khusus untuk menjelaskan hasil analisis data dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul “**DAMPAK BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS DI NIGERIA**” ialah sebagai berikut:

**BAB I :           PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka atau penjelasan lebih lanjut terhadap teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian meliputi tinjauan pustaka untuk teori realisme neoklasik, konsep *decision making* dan konsep bantuan luar negeri.

**BAB III :            GAMBARAN UMUM TENTANG BREXIT DAN  
BANTUAN LUAR NEGERI INGGRIS**

Bab ini merupakan penjelasan tentang gambaran umum tentang sejarah dan proses Brexit serta bagaimana kebijakan terhadap bantuan luar negeri Inggris. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang referendum Brexit sekaligus proses Brexit dan bagaimana kebijakan Inggris terkait bantuan luar negeri berjalan.

**BAB IV : DAMPAK BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMOTONGAN BANTUAN LUAR NEGERI  
INGGRIS**

Bab ini merupakan penjelasan tentang dampak Brexit terhadap kebijakan pemotongan bantuan luar negeri Inggris pasca Brexit. Melalui bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan Inggris yang melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negeri dan bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi negara resipien atau penerima yang dalam hal ini adalah Nigeria.

**BAB V : KESIMPULAN**

Adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran dari pembahasan bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Realisme Neoklasik**

Teori realisme neoklasik merupakan teori yang muncul setelah perang dingin tepatnya sebagai jawaban atas kelemahan-kelemahan teori realisme sebelumnya yakni realisme klasik dan neorealisme. Istilah realisme neoklasik pertama kali digunakan oleh Gideon Rose dalam ulasannya yang terbit pada tahun 1998 dengan judul *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*. Dalam tulisannya Rose mengajukan pandangan baru mengenai kebijakan luar negeri yang pada dasarnya dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal. Cakupan serta arah dari kebijakan luar negeri suatu negara dapat dianalisis dengan melihat posisi negara tersebut dalam sistem internasional dan kekuatan material relatif yang dimiliki (Rose, 1998). Dengan kata lain realisme neoklasik berupaya untuk menggabungkan tingkat analisa unit yang menjadi dasar realisme klasik dengan analisa struktur yang dibawakan oleh neorealisme. Perlu diketahui bahwa kebijakan luar negeri sendiri merupakan satu konsep yang sangat erat kaitannya dengan interaksi antar negara. Satu kebijakan tertentu yang diambil oleh negara lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu mendorong perbedaan interaksi yang beda pula. Dengan memahami tren atau model kebijakan luar negeri suatu negara dengan menggunakan teori neorealisme klasik maka akan mudah untuk memprediksi bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya memang terbentuk dari proses tertentu berdasarkan pertimbangan internal maupun eksternal satu negara.



Dalam sebuah buku Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivitas mengemukakan bahwa realisme neoklasik yang dibawakan oleh Rose mencoba untuk mengangkat kembali teori pembuatan politik luar negeri atau *Foreign Policy Decision-making* yang mengutamakan pentingnya politik dalam negeri (*innenpolitik*) dalam menentukan kebijakan politik luar negeri di negara-negara adikuasa. Hal ini sejalan dengan pandangan Carr dan Morgenthau yang mengedepankan unit atau dalam hal ini negara sebagai fokus utama dimana pernyataan ini juga diperkuat oleh R.B.J. Walker bahwa realisme klasik bersifat *inside out* yang artinya unit atau negara yang mempengaruhi sistem internasional. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana suatu negara dapat mengambil atau menghasilkan suatu kebijakan luar negeri tertentu dalam konstelasi interaksi hubungan internasional.

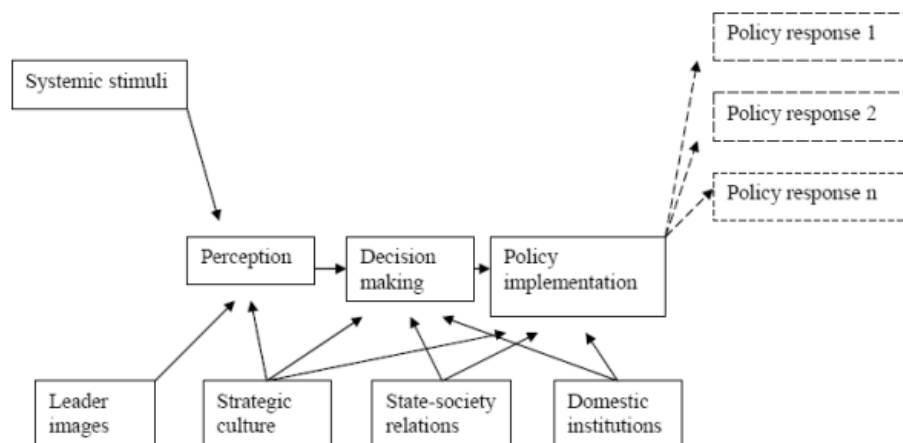
Selain berakar dari realisme klasik, realisme neoklasik pada dasarnya juga menggunakan konsep dari neorealisme yang dipopulerkan oleh Kenneth Waltz yang cenderung bersifat sistemik. Melalui sebuah buku dengan judul *Neoclassical Realism, the State, dan Foreign Policy* menjelaskan terkait teori neorealisme Waltz dimana teori tersebut mencoba untuk menjelaskan pola perilaku interaksi antar negara hingga mendefinisikan struktur dari sistem internasional itu sendiri termasuk sistem internasional sebagai sistem yang anarki. Sistem yang anarki tersebut yang mendorong negara untuk menggunakan strategis yang serupa atau mirip untuk mengamankan diri mereka. Sehingga neorealisme Waltz hanya berfokus pada sifat-sifat serta

batasan dari sistem internasional dan mengabaikan karakteristik masing-masing negara. Kelemahan inilah yang nantinya tidak dapat menjelaskan kenapa negara dengan kekuatan relatif yang sama merespon sistem anarki itu dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan realisme klasik yang bersifat *inside out*, neorealisme cenderung bersifat *outside in* yang artinya sistem internasional yang memberikan pengaruh terhadap perilaku dari suatu unit (Hadiwinata, 2017).

Realisme neoklasik hadir untuk melengkapi kelemahan teori sebelumnya dimana teori ini menggunakan karakteristik internal negara sebagai panduan untuk menganalisis respon suatu negara terhadap hambatan internasional. Karakteristik internal ini dapat disebut sebagai variabel internal atau Rose menyebutnya dengan *intervening variables*. Variabel ini meliputi faktor-faktor domestik negara seperti kekuatan material relatif, opini publik, keyakinan ideologis, preferensi elit dan juga persepsi terhadap ancaman (Hadiwinata, 2017). Sedangkan variabel eksternal atau *independent variable* merupakan sistem internasional.

Hal tersebut dijelaskan pada sebuah penelitian oleh Norrin M. Ripsman dengan judul *Neoclassical Realism* menjelaskan mengenai realisme neoklasik sebagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini Ripsman menjelaskan bahwa untuk dapat menjelaskan politik internasional maka perlu untuk memahami sistem internasional serta pengaruh politik domestik negara dalam merespon sistem internasional.

Ripsman juga memberikan gambaran mengenai hubungan antara variabel internal dan eksternal yang ditawarkan Rose dimana seperti yang telah dijelaskan bahwa realisme neoklasik dan neorealisme memiliki kesamaan yaitu keduanya percaya kebijakan suatu negara merupakan respon dari sistem internasional. Secara jelasnya hubungan antara sistem internasional dan politik domestik terhadap kebijakan luar negeri dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Model Realisme Neoklasik pada Kebijakan Luar Negeri**

(Sumber: Ripsman, 2017)

Berbicara mengenai realisme neoklasik dimulai dengan membahas sistem internasional yang menjadi kondisi dimana negara berada dan bagaimana posisi tersebut dapat berpengaruh terhadap tindakan yang diambil suatu negara dalam meresponnya. Dalam buku *Neoclassical Realist Theory of International Politics* mengartikan negara-negara adalah unit-unit utama dalam sistem internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hubungan internasional telah berkembang berbagai aktor non negara seperti perusahaan

individu, perusahaan multinasional, organisasi non pemerintah dan sebagainya. Namun dalam hal ini unit utama dalam sistem internasional adalah aktor yang bersifat *state-centric* karena memiliki pengaruh politis lebih kuat. Waltz sendiri mengartikan sistem internasional sebagai struktur dan unit-unit yang saling berinteraksi dimana sistem politik internasional setelah terbentuk nantinya akan membatasi dan membentuk perilaku unit-unitnya dalam hal ini negara melalui penguatan sosialisasi dan persaingan. Pandangan Waltz dalam sistem internasional kemudian menjadi dasar dari realisme neoklasik dalam mendefinisikan sistem internasional. Pandangan pertama adalah struktur sistem memang memberikan batasan mempengaruhi perilaku negara tapi struktur itu sendiri tidak dapat mengatur tindakan spesifik dari unit individu. Dan yang kedua yaitu sistem yang anarki telah menciptakan ketidakpastian yang meluas antar negara, dimana walaupun negara telah menyadari adanya potensi ancaman mereka tidak memiliki kendali penuh atas distribusi dari resiko tersebut sehingga negara-negara harus mencari solusi sendiri untuk menghadapi tantangan yang muncul dari sistem tersebut.

Sehingga pendekatan realisme neoklasik turut percaya pada beberapa poin utama yang berkaitan dengan sistem internasional berdasarkan turunan dari neorealisme. Yaitu pertama sistem internasional pada dasarnya bersifat anarki yang mengakibatkan negara harus mengandalkan diri mereka sendiri agar dapat bertahan. Kedua bahwa keamanan merupakan kepentingan yang utama dalam sistem anarki tersebut serta ketiga yaitu kondisi anarki membuat kerjasama menjadi sulit karena mendorong negara-negara untuk memilih

keuntungan relatif dibandingkan dengan keuntungan absolut. Berdasarkan pemahaman ini, realisme neoklasik kemudian berpendapat bahwa kebijakan luar negeri negara dibuat dengan memperhatikan kondisi sistem internasional yang bersifat anarki dan kebijakan yang gagal dalam merespon kondisi tersebut dapat membahayakan keamanan nasional.

Berangkat dari pemahaman sistem internasional tersebut, realisme neoklasik kemudian memperluas cakupannya untuk dapat menganalisis lebih jauh terkait faktor-faktor dari sistem internasional yang ditawarkan neorealisme dengan menggunakan konsep *structural modifiers* yaitu konsep yang menjelaskan yang berpengaruh dalam sistem internasional seperti faktor geografi, tingkat difusi teknologi serta keseimbangan ofensif-defensif dalam teknologi militer. Faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap modifikasi efek dari struktur sistem internasional yang nantinya dapat berpengaruh terhadap interaksi antar negara. Selain itu, walaupun keseimbangan ofensif-defensif militer dapat menjadi tolak ukur dalam melihat suatu sistem kenyataannya hal ini tidak dapat berlaku pada semua kondisi. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya intensitas dilema keamanan antar negara atau kelompok negara tertentu ataupun pada wilayah geografis tertentu. (Ripsman dkk., 2016)

Lebih lanjut yaitu pembahasan terkait distribusi kekuatan relatif. Dalam realisme neoklasik memandang pengaruh dari kekuatan relatif menjadi faktor yang paling penting dalam pencapaian kepentingan negara dalam sistem internasional. Kekuatan relatif dapat dianggap sebagai hal yang tidak jelas

dalam sebuah sistem internasional yang anarki sebab pengaruh dari kekuatan ini sendiri sulit untuk diukur apakah dikategorikan sebagai sebuah ancaman atau peluang. Disebut relatif karena kekuatan dari suatu negara dapat berubah seiring waktu. Kekuatan relatif negara juga terdiri atas berbagai aspek seperti militer, ekonomi dan budaya. Dalam konteks keamanan internasional kekuatan relatif ini seringkali diukur dengan menggunakan indikator kemampuan militer sedangkan dalam konteks ekonomi difokuskan pada hal-hal seperti produk domestik bruto atau PDB, investasi, dan juga perdagangan. Perubahan dari kekuatan negara ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti perubahan dalam perekonomian, inovasi teknologi, kebijakan luar negeri hingga dinamika dalam politik regional dan global.

Selanjutnya mengenai realisme neoklasik yang menyatakan jika suatu negara tidak selalu mengeluarkan kebijakan atas respon sistem internasional melainkan terdapat variabel internal atau kondisi domestik yang mempengaruhi tindakan negara tersebut. Pada akhirnya negara tidak dapat mengambil kebijakan yang optimal dikarenakan kondisi domestik yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan kondisi politik yang kompleks itu terdiri atas berbagai faktor seperti persepsi dari pemimpinnya yang dalam menentukan kebijakan. budaya dari negara dalam membentuk tanggapan negara, hubungan antar negara dan masyarakat yang berdampak pada kemampuan negara untuk membuat serta melaksanakan keputusan serta lembaga-lembaga politik dalam negara yang dapat memberikan dukungan ataupun hambatan terhadap pemimpin negara (Ripsman, 2017).

*Intervening variables* dijelaskan lebih lanjut dalam buku *Neoclassical Realist Theory of International Politics* menjelaskan bahwa *intervening variables* berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri meliputi beberapa faktor seperti citra dan persepsi pemimpin negara, strategis budaya, hubungan antar negara-masyarakat, dan pengaturan institusional domestik. Faktor-faktor ini dapat menunjukkan jika terdapat hambatan atau kendala pada aktor-aktor pembuat kebijakan, interaksi antar pembuat keputusan dan masyarakat, serta proses maupun mekanisme dimana kebijakan luar negeri dirumuskan akan mempengaruhi respon negara dalam menanggapi stimuli eksternal atau tekanan dari sistem internasional.

**Faktor pertama** yaitu persepsi pemimpin negara dimana pandangan dari para pemimpin ini berupa keyakinan, nilai serta pengalaman pribadi pemimpin yang nantinya dapat mempengaruhi cara respon mereka terhadap stimuli sistem dari luar. Dengan kata lain pemahaman mereka terhadap kekuatan, persepsi risiko, dan kodifikasi operasional juga memainkan peran yang penting. Contoh sejarahnya yaitu ketika Uni Soviet mengalami penurunan yang menyebabkan Mikhail Gorbachev merespon dengan cara yang cenderung berbeda dengan keputusan pemimpin sebelumnya yaitu dengan melakukan reformasi internal untuk meredakan ketegangan internasional. Tindakan ini menurut presiden Amerika Serikat pada saat itu yakni Ronald Reagan menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman sehingga kembali merespon dengan membentuk kebijakan luar negeri dengan cara membangun kembali kekuatan militer Amerika. Selanjutnya **faktor kedua** strategis budaya menurut Kitchen, Dueck,

dan Cha dapat digunakan sebagai *intervening variables* yang dimana ideologi dan budaya dapat mempengaruhi respon negara dalam menghadapi tekanan sistem internasional dengan mencerminkan preferensi budaya yang dimiliki negara tersebut dalam mempertahankan dukungan politik domestik. **Faktor ketiga** selanjutnya yaitu hubungan antara negara dan masyarakatnya. Untuk hal ini dapat dilihat dalam tiga poin utama yang harus diperhatikan, yang pertama dapat dilihat sejauh mana harmoni terjalin antara negara dan masyarakat. Hubungan yang baik antara negara dan masyarakatnya dapat memperkuat kebijakan luar negeri yang dibuat karena lebih menitikberatkan pada pertimbangan keamanan serta kepentingan internasional. Sedangkan hubungan yang tidak baik dapat menciptakan kondisi ketidaksetujuan antara negara dan masyarakat dimana kebijakan luar negeri lebih dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan domestik dan bukan kepentingan internasional. Untuk faktor keempat dan terakhir yaitu institusi domestik yang mencakup struktur negara dan lembaga politik dalam negeri seperti institusi formal, prosedur organisasi, dan kontrol birokrasi yang berperan dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh dalam demokrasi pembagian kekuasaan, kontrol dan keseimbangan, serta dukungan publik dapat membatasi kebijakan luar negeri (Ripsman dkk., 2016).

Dengan demikian realisme neoklasik dapat dijadikan sebagai alternatif teori yang dapat menjelaskan perilaku-perilaku negara yang saling berbeda dalam merespon sistem internasional. Hal ini dikarenakan realisme neoklasik menggabungkan konsep neorealisme dan realisme klasik yaitu dengan



menghadirkan dua variabel utama yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Dua variabel tersebut yakni *independent variable* atau variabel independen atau dalam konteks realisme neoklasik dapat disebut sebagai faktor eksternal. Namun, realisme neoklasik percaya bahwa faktor eksternal tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan respon yang diberikan negara terhadap tekanan dari sistem internasional yang dihadapi. Karena itu realisme neoklasik juga menggunakan *intervening variables* atau variabel tambahan dan dalam hal ini adalah faktor internal. Faktor internal ini meliputi berbagai indikator domestik dalam negara yang berperan dalam mem-*filter* faktor eksternal tadi sebelum dikeluarkan sebagai tanggapan negara dalam bentuk kebijakan luar negeri.

## **B. Konsep *Decision Making***

Perkembangan hubungan internasional yang semakin kompleks menciptakan ambiguitas dalam menelaah kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah dengan menggunakan *Decision Making*. *Decision Making* secara umum adalah suatu proses pengambilan keputusan dimana pembuat kebijakan harus menyeleksi pilihan kebijakan yang paling memungkinkan diantara berbagai faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan fokus maupun definisi *decision making* pun berbeda-beda oleh para ahli. Seperti hipotesis hubungan *Man-Milieu* oleh Margaret dan Harold Sprout berpendapat bahwa untuk menganalisis kebijakan luar negeri maka perlu untuk melihat lingkungan atau dalam hal ini konteks internasional dan operasional yang diinterpretasikan oleh

para pengambil keputusan. Model ini merupakan salah satu model yang cukup signifikan dimana kebijakan luar negeri dapat dijelaskan melalui psikososial lingkungan para pengambil keputusan seperti lingkungan psikologis, situasional, politik, dan sosial. Sedangkan persepsi dari pembuat kebijakan pada dasarnya tergantung dari kepribadian, keyakinan, sikap, nilai yang dianut, pengalaman, emosi, konsepsi nasional dan diri yang mana hal ini berkaitan erat dengan aspek psikologis pengambil keputusan. Dengan kata lain faktor individu memegang peranan kunci untuk memahami kenapa suatu kebijakan dibuat (Al-Najjar & Husein, 2022).

Berbeda dengan Margaret dan Harold yang fokus pada hubungan antara pembuat keputusan dan lingkungan(milieu). James N.Rosenau lebih fokus pada analisis kebijakan luar negeri pada tingkat negara individual terutama terkait peran individu seperti pemimpin dalam membuat suatu kebijakan. Rosenau dalam buku *Pre Theories and Theories of Foreign Policy* yang terbit pada tahun 1966 menekankan pada keputusan sebagai hasil dari tindakan individu dan juga pengaruh pemimpin, dimana Rosenau memberikan perhatian pada lima kelompok sumber kebijakan luar negeri yang meliputi. Sumber tersebut nantinya akan mempengaruhi tingkat diurutkan berdasarkan karakteristik negara tersebut baik itu berdasarkan ukuran negara, tingkat demokrasi maupun tingkat pengembangan. Kelima sumber tersebut meliputi idiosinkratik atau individu, peran, pemerintahan, sosial, dan variabel sistemik. Rosenau menyoroti betapa pentingnya memahami keputusan sebagai hasil atau produk dari kelima sumber tersebut. (Al-Najjar & Husein, 2022).

Berdasarkan penggambaran mengenai *decision making* yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat perbedaan yang mencolok terhadap fokus dari kebijakan luar negeri suatu negara. Margaret dan Harold Sprout lebih berfokus pada hubungan antara lingkungan yang mendorong persepsi dari pembuat keputusan terhadap suatu kejadian dan James N. Rosenau yang lebih menekankan pada analisis kebijakan luar negeri berdasarkan urutan tingkat negara yang dipengaruhi oleh beberapa sumber.

Dalam sebuah penelitian oleh Margaret G. Herman dengan judul *How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework* menjelaskan bahwa dalam kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional suatu negara. Namun, perlu digaris bawahi faktor-faktor tersebut terlebih dahulu harus melalui proses identifikasi, perumusan dan implementasi oleh aparat politik negara sebab dikatakan bahwa politik oleh pembuat kebijakan atas pertimbangan berdasarkan sifat masalah dan juga struktur dari pemerintahan. Sebenarnya hal ini cukup sejalan dengan pandangan Rose sebelumnya pada realisme neoklasik yang mengatakan kebijakan luar negeri walaupun timbul akibat respon atas sistem internasional, tapi sebelum diimplementasikan harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi oleh para pembuat kebijakan. Herman kemudian menjelaskan perbedaan sifat dan struktur dari pembuat keputusan juga dapat membentuk kebijakan luar negeri yang berbeda, contohnya jika pemimpin yang kuat dapat menghasilkan keputusan yang cepat karena memiliki pengaruh yang lebih dominan

dibandingkan pembuat kebijakan dalam bentuk kelompok atau koalisi yang mesti melibatkan negosiasi dan konsensus.

Dalam sebuah penelitian oleh Sherzad Ahmed Ameen Al-Najjar dan Sartip Khalis Husien dengan judul *Richard Snyder's Approach for Analyzing Decision-Making Process in Foreign Policy*. Dalam tulisan ini menjelaskan sejumlah perbedaan *decision making*. Fokus utama Snyder dalam proses *decision making* adalah para pengambil keputusan. Snyder beranggapan bahwa para pembuat keputusan tersebut yang mewakili negara dalam mengambil keputusan dan bukan negara itu sendiri. Sehingga penting untuk menganalisis perspektif mereka, dan bagaimana mereka dalam merumuskan suatu kejadian. Dengan kata lain Snyder mengusulkan penelitian empiris dan evaluasi terkait komponen psikologis dan juga sosiologis. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena untuk menilai persepsi, motivasi, nilai dan bahkan tujuan dari para pengambil keputusan memiliki jangkauan yang sangat luas. Akhirnya metode yang diperlukan untuk mengaitkan semua variabel tersebut tidak dapat dijelaskan secara jelas dan memadai.

Sedangkan menurut Richard C. Snyder, H. W Bruck & Burton Sapin atau bisa disingkat SBS lebih beranggapan bahwa untuk dapat memahami kebijakan luar negeri maka perlu memahami terlebih dahulu bagaimana para pembuat keputusan mendefinisikan situasi mereka sebagai aktor dalam politik internasional. Mereka menolak pengertian bahwa tindakan negara hanya berasal dari kepentingan nasional objektif saja, melainkan kepentingan tersebut

datang atau terbentuk sejauh mana orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keputusan percaya pada kepentingan tersebut. Selain itu SBS juga menekankan bahwa *decision making* merupakan titik utama dalam integrasi berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri seperti ideologi, kebijakan, organisasi, institusi, opini publik, hukum dan juga karakter nasional. Dengan kata lain menurut SBS persepsi dari para pembuat keputusan penting untuk memahami kebijakan luar negeri suatu negara (Al-Najjar & Husein, 2022).

Lebih lanjut dalam buku *Foreign Policy Decision-Making* oleh Richard C. Snyder, H. W Bruck & Burton Sapin tersebut juga mengakui bahwa dalam *decision making* yang perlu dijadikan fokus utama adalah para pembuat keputusan karena dari mereka tindakan negara yang dihasilkan merupakan bentuk cerminan dari pendefinisian terhadap situasi yang terjadi. Jika meminjam istilah dari Rose maka persepsi pembuat keputusan terhadap suatu masalah menjadi inti dari kebijakan luar negeri. SBS juga menjelaskan alasan preferensi pembuat keputusan yang berbeda dapat berdampak pada pengambilan keputusan. SBS menyatakan bahwa pembuat keputusan memiliki tingkatan preferensi terhadap alternatif pilihan yang tersedia pada proses pembuatan keputusan. Tingkatan preferensi ini dipengaruhi tidak hanya berasal dari individual pembuat keputusan tapi juga berasal dari aturan sistem organisasi dimana pembuat keputusan bertindak. Aturan ini meliputi konvensi juga preseden. Selain itu pengalaman organisasi selama waktu tertentu bersama dengan pengalaman masa lalu pembuat keputusan memiliki pengaruh terhadap

tingkat preferensi tersebut. Faktor tambahan lain yang harus dipertimbangkan adalah informasi yang dimiliki. Kepemilikan informasi atas alternatif yang ada dapat memberikan konteks agar pembuat keputusan dapat menentukan alternatif yang paling tepat.

Di Inggris sendiri proses dari *decision making* terkhususnya pada kebijakan luar negeri tidak terlepas dari bentuk konstitusi yang dianut oleh Inggris. Dasar dari proses kebijakan luar negeri di Inggris diawali dengan menteri, pejabat, dan pihak luar yang memiliki keahlian relevan harus merumuskan kebijakan melalui diskusi terkait segala alternatif yang memungkinkan. Setelah dirumuskan, kebijakan tersebut perlu diinterpretasikan oleh badan dan lembaga resmi dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebenarnya dalam praktiknya proses ini mengalami sejumlah kerumitan disebabkan semakin kompleksnya hubungan luar negeri dan badan yang terlibat semakin kompleks pula. Sehingga seringkali sulit untuk menentukan dari mana tahapan awal bermula dan berakhir (Williams, 2004).

Selama masih menjadi anggota UE, kebijakan luar negeri Inggris banyak dipengaruhi oleh prinsip dan struktur kebijakan luar negeri bersama yang juga diadopsi oleh negara-negara anggota. Beberapa contoh aspek utama kebijakan bersama tersebut yaitu *Common Foreign and Security Policy* yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri UE yang dirancang untuk mengkoordinasikan pendekatan luar negeri negara anggota. Pembuatan keputusan dalam CFSP ini melibatkan berbagai konsultasi dan juga koordinasi

dengan negara anggota UE. Selanjutnya ada *Common Security and Defense Policy* yang bertujuan untuk mengatur segala keputusan tentang operasi militer dan intervensi negara anggotanya. Dan beberapa prinsip dan aturan lainnya, dengan menjadi anggota UE, Inggris memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan UE bersama dengan negara anggota lainnya.

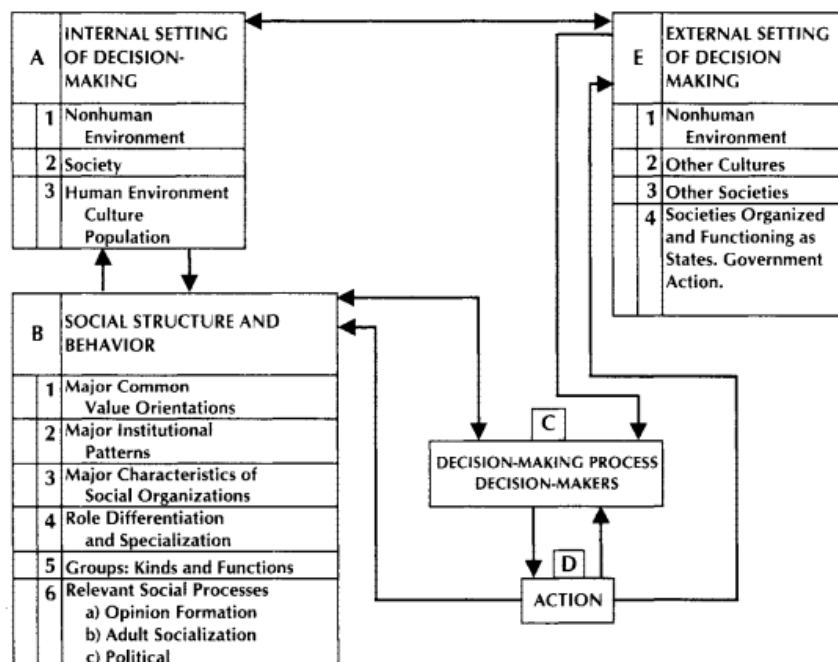
Namun, setelah keluar dari UE. Maka terjadi beberapa perubahan dalam menjalankan kebijakan luar negeri Inggris. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kebijakan luar negeri Inggris merupakan area kewenangan dari bidang eksekutif, perdana menteri, beserta jajaran menteri yang menjabat. Aktor-aktor tersebut bertugas untuk menginisiasi dan juga memformulasi kebijakan luar negeri di Inggris. Lembaga yang bertugas untuk menangani urusan kebijakan luar negeri di Inggris adalah FCDO yang sebelumnya bernama FCO sebelum digabung dengan DFID. FCDO merupakan kementerian yang bertanggung jawab seputar diplomasi, hubungan luar negeri, bantuan pembangunan, dan juga kebijakan luar negeri Inggris. FCDO bekerja sama dengan perdana menteri dan kabinet dalam menyusun opsi-opsi kebijakan yang nantinya opsi yang ada akan didiskusikan lebih lanjut melalui konsultasi internal. Konsultasi ini dilakukan di tingkat pemerintah dimana parlemen dapat memberikan pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut. Barulah nantinya dengan dukungan dari kabinet dan keputusan akhir telah didapatkan, kebijakan tersebut diimplementasi oleh perdana menteri. Dan untuk memahami lebih lanjut bagaimana suatu hal dapat mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Sebuah penelitian yang oleh Erdiatulha dkk memberikan gambaran secara umum mengenai *internal dan external setting* Snyder. Dalam tulisan tersebut *internal setting* meliputi faktor-faktor yang datang dari dalam negeri seperti keadaan dan juga situasi domestik negara. *Internal setting* memiliki tiga unsur utama yakni *Non-Human Environment*, *Human Environment*, *Culture*, *Population* dan *society*. *Non-Human Environment* berkaitan dengan budaya, letak geografis negara, dan sumber daya atau kondisi perekonomian. *Human Environment*, *Culture*, *Population* menyangkut hal-hal yang mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang oleh para pengambil keputusan. Dan yang terakhir ialah *Society* yang merupakan karakter dari masyarakat suatu negara. Dimana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keputusan pemerintah. Sedangkan *external setting* meliputi empat faktor yang terjadi di luar batas wilayah negara seperti *Non-Human Environment* seperti letak geografis dan kondisi ekonomi negara lain, *other cultures* atau kebudayaan negara lain, *other societies* atau opini kelompok masyarakat negara lain dimana pendapat masyarakat internasional dapat mempengaruhi pembentukan citra dari suatu negara. Dan *societies organized and functioning as states and government action* atau tindakan dari negara lain terhadap suatu negara kemudian tindakan tersebut menjadi pertimbangan kembali bagi negara lainnya (Erdiatulha et al., 2020).

Hubungan antar aspek-aspek tersebut ialah dimana aspek A dalam hal *internal setting* saling berpengaruh terhadap aspek F atau *external setting* dimana kedua aspek mempengaruhi proses *decision making* oleh para pengambil keputusan. Namun, untuk *internal setting* sendiri dibentuk oleh



beberapa indikator yang ada pada aspek B. Aspek B merupakan struktur sosial serta perilaku negara yang mana dipengaruhi oleh beberapa hal seperti orientasi umum sebagian masyarakatnya, pola institusi atau kelembagaan negara, karakteristik organisasi sosial, diferensiasi dan spesifikasi peran setiap jabatan yang menjalankan politik negara, kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam politik negara dan proses sosial yang sejalan dengan politik seperti susunan informasi yang dimiliki terhadap satu kejadian, sosialisasi oleh orang dewasa serta kehidupan politik negara tersebut (Qonita, 2019). Aspek B kemudian saling terkait dengan aspek A yang nantinya akan mendorong pengambil keputusan untuk memilih satu kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah dipaparkan.



**Gambar 2.2 Model Decision Making SBS**

(Sumber: Snyder et al., 2003)

Dengan kata lain konsep *decision making* Snyder dengan SBS memiliki fokus yang berbeda, ide-ide Snyder lebih cocok untuk mempelajari kebijakan luar negeri negara berdasarkan hasil dari kebijakan tersebut sedangkan SBS lebih memprioritaskan pembuat keputusan sebagai inti penelitian. Menurut SBS proses *decision making* merupakan hal yang utama dibandingkan hasil dari kebijakan luar negeri yang dibentuk dari proses *decision making*. Kendati demikian dengan memadukan konsep Snyder dan SBS maka dapat digunakan untuk mendefinisikan kebijakan luar negeri suatu negara secara lebih jelas karena mencakup semua aspek yang diperlukan baik itu *internal setting* mencakup struktur sosial yang mempengaruhinya, *external setting*, dan *decision-makers and decision making process*.

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dibentuk dari *internal dan external setting*. Hal ini juga dapat dipahami dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di Inggris. Dimana kebijakan luar negeri Inggris dibentuk dari berbagai domestik faktor. Contohnya dapat terlihat ketika opini masyarakat Inggris mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam referendum Brexit yang berujung keluarnya Inggris dari UE. Selanjutnya ketika Johnson mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemotongan anggaran bantuan luar negeri dan mayoritas masyarakat Inggris setuju dengan kebijakan tersebut atas dasar pemahaman yang serupa yaitu fokus pada kepentingan nasional Inggris. Lebih lanjut dalam *external setting*, dimana Inggris menghadapi tekanan dari dinamika internasional yang mendorong Inggris untuk memiliki peran aktif salah satunya dengan kebijakan

*Indo-Pacific tilt* atas dasar dominasi peran China di kawasan yang memiliki potensi yang besar bagi kepentingan Inggris.

### **C. Konsep Bantuan Luar Negeri**

Sama halnya dengan fenomena hubungan internasional yang semakin beragam bantuan luar negeri mengalami hal serupa. Fenomena bantuan luar negeri ini dijelaskan secara komprehensif oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murad Ali dan Alam Zeb dengan judul *Foreign Aid: Origin, Evolution and its Effectiveness in Poverty Alleviation*. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan asal-usul serta perkembangan bantuan internasional dari waktu ke waktu. Selain itu penelitian ini juga mengulas berbagai bentuk dan tujuan bantuan luar negeri yang sangat beragam mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan dan membangun infrastruktur, serta mengurangi kemiskinan ekstrim di negara-negara yang belum berkembang. Penulis menerangkan bahwa proses dimulainya era bantuan internasional sebenarnya sudah dimulai sejak zaman penaklukan seperti pada sebuah catatan sejarah oleh Raja Moravia yang meminta bantuan kepada Kaisar Michael. Atau seperti inisiatif dari pihak Kolonial Inggris dan Perancis seperti *Colonial Development and Welfare Fund* dan *the Colonial Development Corporation* yang menurut penulis hampir serupa dengan bentuk-bentuk bantuan ekonomi pada saat ini.

Namun penulis dalam penelitian tersebut juga berargumen bahwa model bantuan luar negeri modern yang berkembang saat ini berawal setelah

Perang Dunia Kedua dan melalui Program Poin Empat yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1949. Program tersebut bertujuan untuk menggalakkan penanaman modal swasta dan pengaruh Amerika Serikat di beberapa negara. Sebenarnya sebelum program Poin Empat Presiden Truman telah ada sebuah pengumuman melalui pidato Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni George Marshall tahun 1947 yang menguraikan program yang sebagai Marshall Plan yang mana memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa. Menurut Therien dan Lloyd bahwa bantuan luar negeri untuk negara dunia ketiga memiliki akar politik dari Marshall Plan, yang didukung oleh pernyataan dari Hjertholm dan White yang menyatakan bahwa kesuksesan dari Marshall Plan telah memberikan dorongan untuk memfokuskan masalah di dunia negara ketiga (Ali & Zeb, 2016).

Sebelum memasuki tahapan lebih praktis dari bantuan luar negeri maka penting untuk meluruskan persepsi yang populer secara umum bahwa bantuan luar negeri seringkali disama artikan dengan utang luar negeri. Ditegaskan bahwa pada dasarnya tidak semua bantuan luar negeri berupa utang luar negeri. Sebaliknya bantuan luar negeri memiliki definisi yang lebih kompleks tergantung fokus dari sudut pandang yang digunakan. Seperti definisi bantuan luar negeri menurut Morgenthau yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan pemenuhan kewajiban beberapa negara kaya terhadap negara miskin. Morgenthau juga menjelaskan terdapat enam bentuk bantuan luar negeri dimana keenam bantuan tersebut memiliki satu kesamaan secara umum yaitu mengenai transfer uang, barang, dan jasa dari satu negara ke negara lain.

Dari keenam bantuan tersebut meliputi bantuan luar negeri kemanusiaan, bantuan luar negeri untuk kelangsungan hidup, bantuan luar negeri militer, suap, bantuan luar negeri untuk prestise, dan bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Dikatakan bahwa hanya bantuan kemanusiaan yang tidak memiliki motif politik didalamnya (Morgenthau, 1962).

Definisi serupa mengenai bantuan luar negeri juga dikemukakan oleh K.J. Holsti dalam karyanya yang berjudul *International Politics: Framework of Analysis* yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan penyerahan dana, teknologi, dan bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima. Holsti juga membedakan bantuan luar negeri kedalam beberapa jenis seperti bantuan militer, bantuan teknik, hibah, dan pinjaman pembangunan (Widamahanata et al., 2017). Dari dua definisi bantuan luar negeri yang telah dipaparkan bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai satu bentuk transfer uang, barang, hingga jasa yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain.

Namun, definisi yang agak berbeda dikemukakan dalam sebuah buku dengan judul *Foreign aid, self-reliance, and economic development in West Africa* yang mendefinisikan bantuan luar negara sebagai bentuk kerjasama antara satu negara atau wilayah yang otonom dengan negara lain yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kemajuan sosial. Karena bantuan luar negeri ini tidak terjadi karena dari dorongan pasar seperti pertukaran komersial standar maka sebagai gantinya

bantuan luar negeri diberikan dengan syarat-syarat khusus atau berdasarkan kesepakatan tertentu. *The Organisation for Economic Cooperation and Development* atau OECD yang merupakan organisasi dimana sejumlah pemerintah negara bekerja sama untuk membentuk standar kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OECD mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer sumber daya baik itu berupa uang, barang, hingga jasa kepada negara, wilayah kawasan, dan lembaga pembangunan multilateral.

Lebih lanjut mengenai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian bantuan luar negeri ialah (Pomerantz, 2024):

- 1) Setiap transaksi bantuan luar negeri digunakan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara berkembang.
- 2) Dalam bantuan luar negeri paling tidak harus terlibat dana hibah setidaknya sebesar:
  - a) 45 persen dalam kasus pinjaman bilateral ke sektor resmi negara berkembang dan negara berpendapatan rendah.
  - b) 15 persen jika kasus pinjaman bilateral ke sektor resmi negara berpendapatan menengah rendah.
  - c) 10 persen apabila kasus pinjaman bilateral ke sektor resmi negara berpendapatan menengah atas.
  - d) dan 10 persen dalam kasus pinjaman ke dalam lembaga multilateral.

Lebih lanjut mengenai tipologi bantuan luar negeri yaitu terkait klasifikasi bantuan luar negeri menjadi beberapa bentuk berdasarkan aspek pihak pemberi bantuan atau donor, penerima bantuan atau resipien, tujuan bantuan serta dimensi bantuan tersebut. Berdasarkan keempat aspek tersebut maka Rosyidin dalam buku *Politik Bantuan Luar Negeri: Moralitas dalam Dunia Anarki* membagi bantuan luar negeri menjadi tiga bentuk yaitu *Official Development Assistance (ODA)*, *Official Assistance (OA)*, dan *humanitarian assistance* atau bantuan kemanusiaan. Tidak hanya itu, ODA juga merupakan bantuan luar negeri yang dapat berupa hibah (*grants*) dan pinjaman atau (*loans*). Secara sederhana ODA adalah jenis bantuan luar negeri yang disalurkan oleh negara dalam bentuk bilateral dan multilateral. Bantuan bilateral adalah bantuan yang diberikan oleh negara donor secara langsung ke negara penerima melalui kerangka legal seperti perjanjian bilateral. Sedangkan multilateral bantuan yang disalurkan oleh negara donor melalui perantara organisasi-organisasi regional atau global. ODA merupakan bantuan yang fokus pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, membangun infrastruktur, pemberantasan kemiskinan, mendukung *good governance* dan sebagainya.

Kemudian OA merupakan bantuan yang umumnya diberikan oleh negara donor dalam format hubungan bilateral dan cenderung untuk negara-negara berkembang menengah ke atas dan bertujuan untuk memperlancar hubungan diplomatik antarnegara. Berbeda dengan dua jenis bantuan sebelumnya. Bantuan kemanusiaan diberikan oleh beberapa aktor baik dari

negara, organisasi multilateral, maupun individu. Selain itu bantuan kemanusiaan juga diberikan untuk para korban bencana baik itu karena perang dan bencana alam dan memang ditujukan untuk aspek kemanusiaan dibandingkan dua bantuan sebelumnya yang fokus dalam aspek sosial-ekonomi, dan politik-keamanan.

Setelah mengetahui definisi bantuan luar negeri, selanjutnya penting untuk meletakkan fokus pembahasan terkait motif-motif dari bantuan luar negeri tersebut. Pada dewasa ini, bantuan luar negeri bukan sekedar bantuan moralitas yang diberikan satu negara ke negara lain atas dasar kedermawanan. Sebaliknya, ada tujuan dibalik bantuan luar negeri tersebut. Bantuan luar negeri dalam hubungan internasional sudah sangat lumrah dijadikan sebagai satu alat kebijakan luar negeri suatu negara dalam memperluas dominasi kekuasaannya dalam kancah dunia internasional. Maka tidak heran apabila suatu negara memberikan bantuan luar negeri ke negara lain karena berbagai motif dan faktor baik itu politik, ekonomi, wilayah strategis, ancaman negara lain dan sebagainya.

Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada sebuah penelitian dengan judul *Effectiveness of Foreign Aid: A Critical Assessment* oleh Jayathilaka dan Bandara. Pada poin empat penelitian tersebut dijelaskan alasan mengapa negara donor memberikan bantuan luar negeri dimana setidaknya terdapat dua alasan utama yaitu alasan politik dan alasan ekonomi.

1. Alasan Politik



Ada berbagai macam alasan politik dibalik bantuan luar negeri suatu negara yang seringkali tujuan politik tersebut lebih dominan dibandingkan meningkatkan kemakmuran di negara penerima. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang mengutamakan pertimbangan keamanan nasional dalam keputusan bantuan luar negerinya. Kemudian ada Swedia yang cenderung mengalokasikan bantuannya untuk negara-negara progresif atau negara yang dianggap memiliki pandangan atau nilai-nilai kemajuan dan memiliki pendekatan yang proaktif terhadap isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Jepang yang memiliki kepentingan komersial sehingga seringkali bantuan luar negeri Jepang cenderung mengalir ke negara-negara yang strategis bagi kepentingan Jepang. Selain itu banyak negara donor yang juga memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara mantan koloni mereka sebagai bentuk untuk mempertahankan pengaruh politik mereka.

## 2. Alasan Ekonomi

Alasan selanjutnya negara donor memberikan bantuan kepada negara-negara yang masih berkembang ialah untuk memastikan bahwa negara-negara tersebut memiliki dana yang cukup untuk melakukan investasi dan demi kebutuhan devisa. Contoh sederhananya yaitu ketika negara berkembang tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai proyek investasi maka negara donor dapat memberikan bantuan. Bantuan tersebut seringkali disertai dengan syarat seperti negara penerima diharuskan untuk membeli produk ekspor dari negara pemberi bantuan.

Kemudian terkait bantuan luar negeri yang perlu diperhatikan adalah dampak atau efek yang ditimbulkan. Pada dasarnya dampak dari bantuan luar negeri telah menimbulkan perdebatan panjang di kalangan para akademis. Beberapa peneliti seperti Burnside dan Dollar yang melalui penelitian yang telah mereka lakukan ditemukan fakta bahwa bantuan luar negeri memiliki efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerimanya. Namun, kondisi ini hanya dapat tercapai apabila kondisi internal negara penerima dalam kondisi yang baik. Maksudnya adalah jika suatu negara penerima memiliki tata kelola pemerintahan yang baik serta kebijakan ekonomi yang seimbang maka bukan tidak mungkin bantuan yang didapatkan memiliki efek positif. Sebaliknya yaitu jika negara penerima memiliki kondisi pemerintahan yang buruk seperti korupsi merajalela dan kebijakan perekonomian dan politik yang buruk maka bantuan yang diberikan hanya akan memberikan dampak negatif. Seperti yang juga dikemukakan oleh S. Djankov dkk bahwa bantuan luar negeri berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di sejumlah negara miskin yang mana telah memperburuk korupsi, mendorong ketergantungan, konflik sipil dan sebagainya (Depinto et al., 2022).

Lebih lanjut untuk memudahkan dalam melihat dampak dari bantuan luar negeri dari negara donor terhadap negara penerima yaitu dengan menggunakan pendekatan hubungan donor-resipien. Pendekatan ini digunakan oleh Machiko Nissanke dalam penelitiannya yaitu *Donor–Recipient Relationships in the Aid Effectiveness Debate*. Melalui penelitian ini Nissanke berargumen bahwa bagaimana hubungan antara donor-resipien harus

diperhitungkan dalam menilai penyaluran bantuan luar negeri telah berjalan secara efektif. Penelitian tersebut juga menyoroti mengenai pentingnya kapasitas pemerintah negara penerima dalam mengidentifikasi serta menyusun prioritas mereka sendiri untuk keberhasilan program bantuan luar negeri. Kapasitas ini seringkali terhambat dikarenakan kondisi internal negara penerima yang tidak stabil baik karena konflik atau karena berpendapatan rendah. Nissanke berargumen bahwa dalam menganalisis efektifnya suatu bantuan luar negeri maka perlu untuk melihat hubungan antara donor dan penerima, dimana negara donor dapat memberikan ruang dan mendorong lebih terbukanya diskusi lebih luas tentang model pembangunan yang sesuai dan membangun kemitraan yang lebih kuat dengan negara penerima (Jerve et al., 2007).

Hubungan donor-penerima merupakan salah satu kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk melihat peran kedua belah pihak agar dapat menganalisis dampak dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh donor kepada penerima. Hubungan donor-penerima menitikberatkan pada konsep *ownership* (kepemilikan) yang merupakan komponen utama dan kritis untuk membentuk sekaligus merawat hubungan antara pemberi bantuan dan penerima serta pemberian bantuan yang efektif. Unsur kepemilikan dalam model hubungan donor-resipien bantuan luar negeri sebenarnya merupakan sebuah konsep yang terbentuk karena seringkali terjadi suatu situasi dimana negara donor seringkali mendominasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang diambil, bagaimana bantuan luar negeri harus digunakan dan

seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi negara penerima dalam mendapatkan bantuan (Whitfield, 2009). Sebelumnya dalam kebijakan bantuan luar negeri terdapat kondisionalitas dalam beberapa dekade sebelumnya. Kondisionalitas merupakan satu kebijakan dimana bantuan luar negeri diberikan kepada negara yang dapat memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu yang diberikan dari donor. Kondisi kondisionalitas ini menyebabkan negara penerima menjadi kurang memiliki rasa kepemilikan dalam penggunaan bantuan luar negeri. Akhirnya bantuan yang digunakan serta merta tidak dapat memberikan dampak yang seharusnya (Jerve et al., 2007).

Konsep kepemilikan merupakan unsur kunci untuk meningkatkan kualitas dari pengiriman bantuan luar negeri dan pertama kali diperkenalkan pada Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan pada tahun 2005 lalu. Konsep ini mendorong antara kedua pihak negara donor dan negara penerima untuk menjalankan peran mereka dalam praktik pembangunan dengan cara memastikan partisipasi kepemilikan lokal dari negara penerima. Dengan konsep ini diharapkan donor dapat mengurangi dominasinya dan membiarkan para pemimpin negara di bagian selatan dapat mendorong proses pembangunan sesuai dengan konsep kepemilikan dengan negara mitra berkomitmen untuk (Paksi, 2019):

1. Memimpin dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pembangunan nasional melalui proses konsultasi.
2. Menerjemahkan strategi pembangunan nasional menjadi program operasional yang diutamakan pada orientasi hasil.

3. Mengambil peran utama dalam melakukan mengelola bantuan tersebut baik dalam dialog dengan negara donor maupun dalam mendorong partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta.

Sedangkan dari pihak donor berperan dalam menghormati kepemimpinan negara penerima dan berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan teknis ke negara penerima. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dan kapasitas negara penerima dalam melaksanakan program-program pembangunan. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa negara penerima seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan kebijakan mereka sendiri, mengelola tata kelola, dan merancang sistem kesejahteraan sosial dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka.